

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah

a. Sejarah Berdirinya

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Provinsi Kalimantan Tengah, pada dasarnya merupakan restrukturisasi dari balai penataran guru Provinsi Kalimantan Tengah. LPMP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pusat di daerah atau di Provinsi Kalimantan Tengah.

Salah satu upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru-guru yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/penataran bagi guru-guru berbagai bidang mata pelajaran. Seiring perjalanan waktu jumlah guru semakin bertambah. Keterjangkauan diklat/penataran terhadap jumlah guru semakin jauh. Mengingat hal tersebut, diklat/penataran akan menjangkau kuantitas guru apabila ada wadah diklat/penataran bagi guru di tingkat provinsi Kalimantan Tengah.

Tuntutan tersebut semakin tinggi sesuai dengan kuantitas guru di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dengan demikian, sangat perlu pendirian Balai Penataran Guru (BPG) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia No. 024a/O/1990 tentang organisasi dan

tata kerja balai penataran guru dalam Bab IV Lokasi Pasal 16 dinyatakan: “Sejak berlakunya keputusan ini BPG terdapat di 27 lokasi terdiri atas 12 lokasi yang telah ada sebelum ditetapkan keputusan ini dan 15 Lokasi baru di Provinsi D.I. Aceh, Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Irian Jaya dan Timor Timur.¹

Berdasarkan surat keputusan di atas, secara organisasi dan kelembagaan bahwa BPG Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sudah diakui keberadaannya sejak tahun 1990. Pengakuan sebagai BPG tersebut karena harus mengikuti keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru. Dengan demikian, secara organisasi atau kelembagaan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan Keputusan Mendikbud Nomor: 02401/O/1990 diakuinya keberadaan BPG.

Pada tahun 2003, BPG mengalami reorganisasi dan restrukturisasi menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 087/0/2003, tanggal 4 Juli 2003. Hadirnya LPMP merupakan reorganisasi dan restrukturisasi dari Balai Penataran Guru (BPG). Dari hasil prarestrukturisasi tersebut, maka BPG hanya memiliki fungsi menyusun program penataran dan melaksanakannya, mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan penataran, melaksanakan urusan

¹Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, Dirlendik, 2002, hal. 16.

tata usaha dan urusan rumah tangga BPG sesuai SK Mendikbud RI nomor 0203/0/1978.

Sedangkan pascarestrukturisasi, LPMP akan mengemban tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. Kedudukan LPMP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini mengalami perubahan.

Perubahan tersebut dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 7 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan tersebut menyatakan nama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (LPMP Kalteng). Lembaga ini berkedudukan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik. Keberadaan LPMP ini diharapkan mampu menjembatani proses pendidikan sentralisasi ke desentralisasi dalam era otonomi daerah. Imbasnya, penjaminan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah dapat terkendali dengan diterapkannya standar-standar pendidikan mutu guru sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan yang berlanjut pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.²

b. Visi dan Misi

Visi LPMP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 37 Tahun 2012 adalah Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan Berstandar Nasional dan Berwawasan Global di Provinsi Kalimantan Tengah.

²Profil LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, h. 10.

Sedangkan misi dari LPMP, sebagai berikut:³

Misi LPMP sesuai Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

37 Tahun 2012 Provinsi Kalimantan tengah yaitu:

1. Melaksanakan pemetaan mutu TK/RA, pendidikan dasar dan menengah serta bentuk lain yang sederajat
2. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu TK/RA, pendidikan dasar dan menengah serta bentuk lain yang sederajat
3. Melaksanakan supervisi satuan pendidikan TK/RA, pendidikan dasar dan menengah serta bentuk lain yang sederajat
4. Melaksanakan fasilitasi sumber daya pendidikan TK/RA, pendidikan dasar dan menengah serta bentuk lain yang sederajat
5. Melaksanakan kemitraan dalam penjaminan mutu pendidikan dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi.

c. Tugas dan Fungsi LPMP

Tugas: Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA dan bentuk lain yang sederajat di Provinsi.

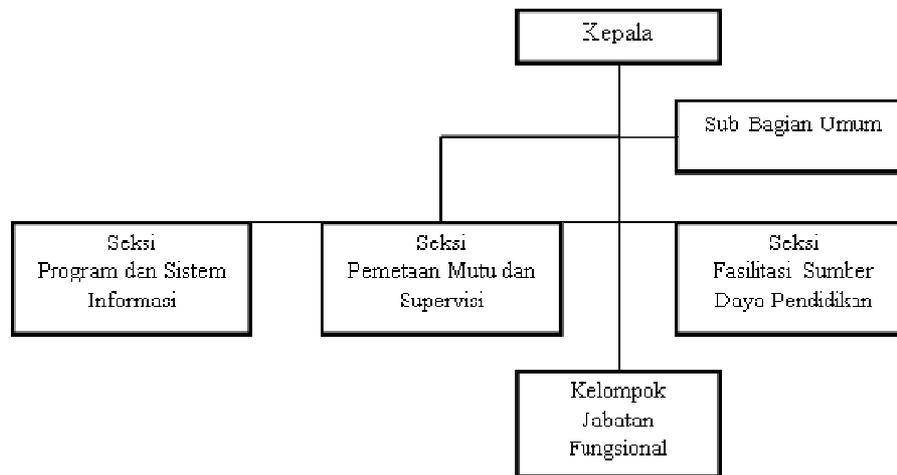
Fungsi LPMP:

- 1) Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA dan bentuk lain yang sederajat.
- 3) Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA dan bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
- 4) Fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap termasuk TK, RA dan bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan.

³Profil LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, h. 12.

d. Struktur Organisasi LPMP

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Jumlah Pegawai LPMP/Sumber daya manusia di LPMP sebanyak 102 orang dengan rincian, sebagai berikut:⁴ (1) kualifikasi akademik, S2: 22 orang, S1: 58 orang, Diploma: 7 orang, SLTA/SMK: 12 orang, SLTP: 3 orang. (2) jenis kelamin, laki-laki: 57 orang, perempuan: 43 orang.

e. Job Description LPMP

Job Description adalah merupakan suatu penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi. Berikut ini akan penulis paparkan *Job Description* dari kepala LPMP, sub bagian umum, seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS), seksi Pusat Sistem Informasi (PSI), dan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP).

⁴DUK LPMP.

1) Kepala LPMP⁵

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja lembaga.
- b) Melaksanakan koordinasi, integrase dan sinkronisasi internal maupun eksternal.
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat di provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Melaksanakan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan.
- e) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi mutu pendidikan.
- f) Melaksanakan pengkajian, pengukuran dan evaluasi mutu pendidikan.
- g) Melaksanakan fasilitas lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan.
- h) Melaksanakan fasilitas lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.
- i) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain dan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan.
- j) Melaksanakan penyajian dan penyebarluasan informasi mutu pendidikan.
- k) Melaksanakan urusan perencanaan, urusan keuangan, kepegawaiaan, ketatalaksanaan, persuratan dan rumah tangga dilembaga penjaminan mutu pendidikan.
- l) Melaksanakan penilaian kinerja staf dan tenaga fungsional.
- m) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen lembaga penjaminan mutu pendidikan.

2) Sub Bagian Umum⁶

- a) Melakukan penyusunan program kerja sub bagian dan penyiapan program kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, dan anggaran lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- c) Melakukan urusan pembukuan, verifikasi dan perhitungan anggaran lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- d) Melakukan urusan penyusunan laporan daya serap anggaran di lingkungan lembaga penjaminan modal mutu pendidikan.
- e) Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya.

⁵Dokumen LPMP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, h. 6.

⁶Dokumen LPMP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, h. 7.

- f) Melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi serta rencana pendayagunaan dan pengembangan pegawai dilingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- g) Melakukan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan dan pemindahan pegawai secara mutasi lainnya di lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- h) Melakukan urusan disiplin pegawai di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- i) Melakukan penyusunan data dan informasi pegawai dilingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- j) Melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar.
- k) Melakukan pengelolaan perpustakaan dan labotarium di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- l) Melakukan urusan analisis jabatan dan analisis organisasi di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- m) Melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur kerja dilingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- n) Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu dan rapat dinas pimpinan.
- o) Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan dilingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- p) Melakukan urusan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- q) Melakukan urusan inventarisasi dan penghapusan barang milik Negara dilingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- r) Melakukan urusan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.
- s) Melakukan penyiapan bahan kerjasama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.
- t) Melakukakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seb bagian.
- u) Melakukan penyusunan laporan sub bagian dan penyiapan penyusunan laporan lembaga penjaminan mutu pendidikan.

3) Tugas Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS)⁷

- a) Melakukan penyusunan kerja seksi.
- b) Melakukan penyusunan bahan kerja instrument pengumpulan dan pengelolaan data mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
- c) Melakukan penyiapan analisis data dan informasi dalam rangka pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
- d) Melakukan penyiapan bahan pemetaan mutu pendidikan Dasar dan menengah termasuk Taman kanak-kanak (TK), raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
- e) Melakukan bahan penyiapan bahan supervise mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk Taman kanak-kanak (TK), raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
- f) Melakukan penyiapan standarisasi mutu pendidikan Dasar dan menengah termasuk Taman kanak-kanak (TK), raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
- g) Melakukan bahan rekomendasi hasil pemetaan dan mutu dan supervise pendidikan Dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
- h) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi.
- i) Melakukan penyusunan laporan seksi.

4) Tugas Seksi Pusat Sistem Informasi (PSI)⁸

- a) Melakukan penyusunan program kerja seksi.
- b) Melakukan penyiapan penyusunan program penjaminan mutu pendidikan.
- c) Melakukan pengembangan system informasi mutu pendidikan, pendidikan Dasar dan menengah termasuk taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.

⁷Dokumen LPMP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, h. 8.

⁸Dokumen LPMP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, h. 9.

- d) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan, pendidikan Dasar dan menengah termasuk taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
 - e) Melakukan pemutakhiran data dan informasi informasi mutu pendidikan, pendidikan Dasar dan menengah termasuk taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
 - f) Melakukan kerjasama pengembangan program dan sistem informasi.
 - g) Melakukan pemeliharaan sistem informasi mutu pendidikan.
 - h) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi.
 - i) Melakukan penyusunan laporan seksi.
- 5) Tugas Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP)⁹
- a) Melakukan penyusunan program kerja seksi.
 - b) Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya Pendidikan, pendidikan Dasar dan menengah termasuk taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.
 - c) Melakukan pemberian layanan, bimbingan dan bantuan teknis implementasi standar isi, standar proses, dan standar kelulusan.
 - d) Melakukan pemberian layanan bimbingan, dan bantuan teknis implementasi standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan.
 - e) Melakukan kerjasama fasilitasi sumber daya pendidikan.
 - f) Melakukan penyusunan laporan hasil fasilitasi dan pemeliharaan seksi.
 - g) Melakukan penyusunan laporan seksi.

Berkenaan dengan *Job description* tersebut dan keterkaitan LPMP sebagai pelaksana pendidikan dan Pelatihan telah tercantum bahwa LPMP mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan

⁹*Ibid*, h. 12.

serta memfasilitasi sumber daya pendidikan baik tingkat TK, RA, SD, SMP, bahkan SMA untuk menjadi sumber daya yang unggul dan profesional. Pelaksanaan dilakukan oleh TIM khusus yaitu Tugas Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP).

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palangka Raya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dulunya berada disamping Bank BI (sekarang dinas cabang Kota Palangka Raya), karena tidak layak tempatnya kemudian dipindahkan ke jalan Tangkasiang tempat arsip atau gudang buku Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, tepat pada tahun 2000 berlaku peraturan daerah yang dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Setelah sekian tahun berjalan pindahlah Disdikbud ke jalan Kartini hingga sekarang dan masih disebut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak berapa lama kemudian berubahlah nama Disdikbud menjadi Dinas pemuda dan Olahraga (Dispora), selanjutnya dari 2014 sampai sekarang 2015 namanya menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

a. Struktur Organisasi

Setiap lembaga formal didalamnya pasti terdapat pengelolaan yang berkelanjutan, terprogram dan mempunyai struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita, visi dan misi lembaga agar tata kelola sebuah lembaga yang lebih khususnya dalam

penelitian ini tata kelola lembaga Disdikbud dapat berjalan dengan baik.

Susunan organisasi Disdikbud kota Palangka Raya terdiri atas:¹⁰

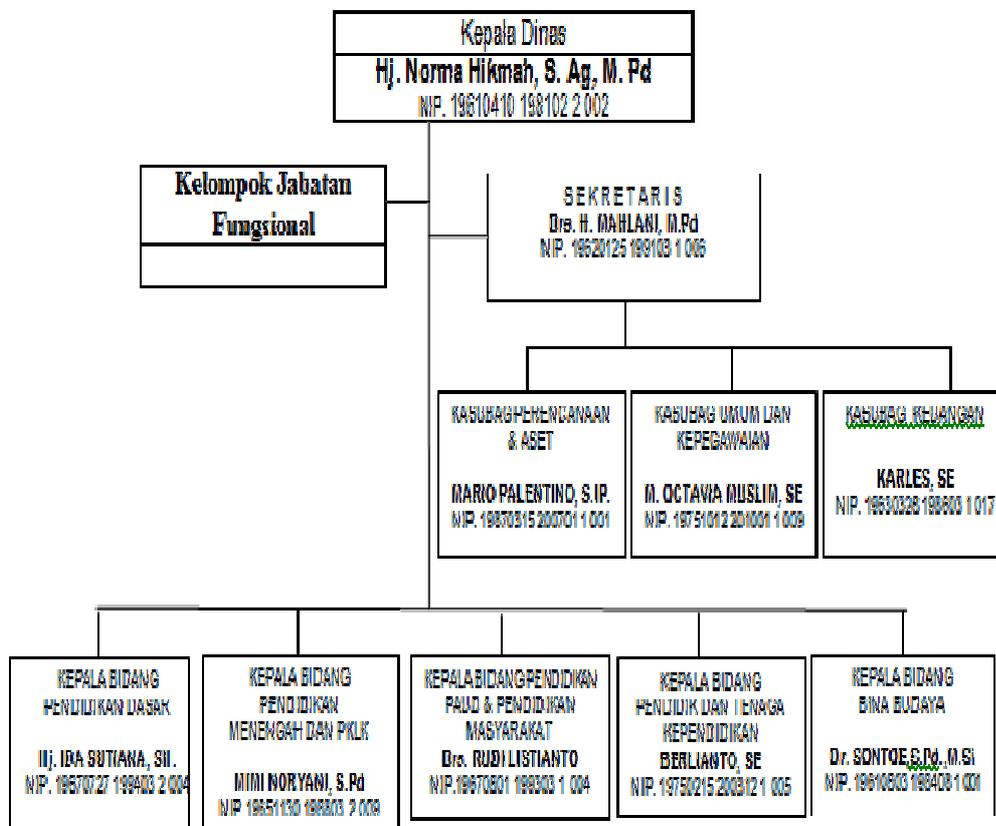
- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Pendidikan Dasar;
 - a) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana, Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Kesiswaan dan Prestasi.
- 4) Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
 - a) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana dan Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Kesiswaan dan Prestasi.
- 5) Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b) Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan
 - c) Seksi Pembinaan PAUD.
- 6) Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - a) Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Dasar;

¹⁰Dokumen DISDIKBUD Kota Palangka Raya, h. 80.

- b) Seksi Pembinaan Tenaga Dikmen dan PKLK; dan
 - c) Seksi Pengembangan Standar Akses Pendidikan.
- 7) Bidang Bina Budaya;
- a) Seksi Sejarah, Nilai Tradisional, Bahasa dan Sastra Daerah;
 - b) Seksi Perlindungan Konservasi Benda Cagar Budaya dan Situs Kepurbakalaan.
- 8) Unit Pelaksana Teknis.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi DISDIKBUD kota Palangka Raya, sebagai berikut:¹¹

GAMBAR 4.2
STRUKTUR ORGANISASI DISDIKBUD KOTA PALANGKA RAYA



¹¹Dokumen Disdikbud Tahun 2015.

b. SOP Disdikbud Kota Palangka Raya

Standart operasional procedure (SOP) merupakan acuan dan pedoman untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan teknisnya baik secara administrasi maupun produsedural.

Disdikbud kota Palangka Raya memiliki SOP masing-masing. Berikut ini akan peneliti paparkan berkaitan dengan SOP masing-masing jabatan di Disdikbud, yaitu:

- 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal/PLS, pembinaan kebudayaan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu hasil pendidikan dan tenaga kependidikan;¹² Sedangkan Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinir penyusunan RENJA, RENSTRA, LKIP, LKPJ, LPPD, Perjanjian Kinerja, SPM, SOP, RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya;¹³
- 2) Sekertariat, meliputi: (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Aset mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan/program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya serta menyusun seluruh kegiatan bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun, mengonsep dan melakukan urusan surat menyurat, pengadaan perlengkapan dan rumah tangga, dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; (3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya;¹⁴

¹²*Ibid*, h. 80.

¹³*Ibid*, h. 81.

¹⁴*Ibid*, h. 82-84.

- 3) Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok merumuskan, mengembangkan, mensosialisasikan, memeriksa, membuat disposisi, terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar, sesuai dengan kewenangannya serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;¹⁵
- 4) Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan PKLK mempunyai tugas pokok merumuskan, mengembangkan, mensosialisasikan, memeriksa, membuat disposisi, terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Menengah dan PKLK, sesuai dengan kewenangannya serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;¹⁶
- 5) Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan, mensosialisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan, pembinaan dan pengembangan pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sesuai dengan kewenangannya serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;¹⁷
- 6) Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok merumuskan, memeriksa dan melaksanakan pengembangan profesionalisme dan pelayanan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;¹⁸
- 7) Bidang Bina Budaya, Kepala Bidang Bina Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelestarian dan pemantauan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.¹⁹
- 8) Unit Pelaksana Teknis, Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan UPT Pendidikan yang meliputi unit

¹⁵*Ibid*, h. 85.

¹⁶*Ibid*, h. 88.

¹⁷*Ibid*, h. 91.

¹⁸*Ibid*, h. 94.

¹⁹*Ibid*, h. 98.

Pendidikan Dasar (PAUD/TK/SD/MI/SMP/MTs/SLBN) Formal dan Informal/Pendidikan Luar Sekolah, dan SaranaPrasarana;²⁰

c. Visi dan Misi

Visi: “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan berdasarkan Falsafah Budaya Betang.”

- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
- 2) Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya, Harmonis, Dinamis, dan Damai berdasarkan Filosofi Huma Betang.
- 3) Mewujudkan *Good Governance* di dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan..

Sedangkan Misi Disdikbud ada tiga macam, Berikut ini diuraikan dalam tabel tentang Misi 1, Misi 2 dan Misi 3 beserta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Disdikbud kota Palangka Raya, yaitu

TABEL 4.1
STRATEGI, ARAH DAN KEBIJAKAN DISDIKBUD
KOTA PALANGKA RAYA

Misi Pertama:			
Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.			
1	2	3	4
Mewujudkan lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional	Terwujudnya lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstandar nasional dan internasional	Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

²⁰*Ibid*, h. 101.

		Meningkatkan Jumlah, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan - kualifikasi guru - Pemerataan distribusi guru
		Menyelenggarakan pendidikan Luar biasa (<i>Inklusif</i>) untuk Anak Penyandang Disabilitas (Cacat)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Akses Terhadap Pendidikan anak berkebutuhan khusus. - Peningkatan mutu kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan luar biasa.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah, budaya pembelajaran dan perpustakaan	Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi sesuai potensi daerah	Pengembangan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai keunggulan daerah
	Penurunan Jumlah Penduduk yang Buta Aksara	Menyelenggarakan Pemberantasan Buta Aksara	Penyelenggaraan Program Pemberantasan Buta Aksara/Non Formal

Misi Kedua:			
Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya, Harmonis, Dinamis, dan Damai berdasarkan Filosofi Huma Betang.			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatkan kehidupan sosial dan budaya dengan menjunjung tinggi filosofi Huma Betang.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamalan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah	Meningkatkan sara kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah	Peningkatan pelestarian seni dan budaya melalui program pengembangan nilai-nilai budaya, seni dan perfilman
	Meningkatnya prestasi seni, budaya dan olahraga	Meningkatkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Peningkatan pengembangan kemitraan dan pengelolaan kekayaan budaya
		Menyelenggarakan ajang peningkatan prestasi seni, budaya dan olahraga.	Penyelenggaraan pembinaan dan perlombaan bidang seni, budaya dan olahraga
Misi Ketiga:			
Mewujudkan <i>Good Governance</i> di dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan.			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kota Palangka Raya	Meningkatkannya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Optimalisasi peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah di kota Palangka Raya

Pelaksanaan rekrutmen kepala sekolah yang telah dilaksanakan oleh Kota Palangka Raya merupakan sebuah inovasi dalam sebuah lembaga pendidikan untuk merekrut kepala sekolah yang profesional. Adapun salah satu lembaga yang ikut andil dalam rekrutmen calon kepala sekolah adalah LPMP Provinsi Kalimantan Tengah.

Fungsi LPMP sebagai pemberian pertimbangan dan persetujuan yang disesuaikan dengan mekanisme rekrutmen karena program rekrutmen yang dilaksanakan oleh LPMP yang berkerja sama dengan Dikdisbud Kota Palangka Raya yang diserahkan kepada tim yang telah ditugaskan. Tim yang ditugaskan oleh LPMP bernama “TIM PPCKS (Panitia Penyiapan Calon Kepala Sekolah)”

Dalam pelaksanaan persiapan rekrutmen calon kepala sekolah ini dilakukan beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Mimi Noryani bahwa:

Tahapan pertama yang dilakukan adalah proyeksi kebutuhan, yaitu suatu perkiraan mengenai kebutuhan kepala sekolah untuk waktu dua tahun yang akan datang. Hasil dari proyeksi kebutuhan kepala sekolah itulah menjadi patokan dasar tentang jumlah calon kepala sekolah yang harus dipersiapkan, proyeksi ini harus dilakukan secara cermat agar kebutuhan kepala sekolah dapat terpenuhi.²¹

²¹Wawancara dengan ibu Mimi Noryani (Perwakilan Kepala Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 7 Agustus 2015, pukul 15:22 WIB.

Berikut ini tambahan wawancara dari bapak Esra yang berkaitan dengan tahapan proyeksi kebutuhan, yaitu:

Proyeksi kebutuhan tersebut dilakukan berdasarkan data-data tentang sekolah, seperti: jenjang, penambahan maupun pengurangan jumlah sekolah. Sedangkan data kepala sekolah seperti: berhenti atas kemauan sendiri, masa tugas selesai, sampai usia pensiun, mendapatkan hukuman disiplin, nilai kinerjanya kurang, sakit atau berhalangan tetap, tugas belajar dan meninggal dunia.²²

Setelah selesai proyeksi kebutuhan, maka dilaksanakan pengusulan calon kepala sekolah. Berikut ini wawancaranya:

Berdasarkan hasil dari proyeksi kebutuhan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah pengusulan yang meliputi: pembuatan surat yang ditujukan kepada sekolah atau madrasah yang ada di Kota Palangka Raya. Selanjutnya kepala sekolah atau pengawas mengusulkan guru yang potensial untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, kemudian guru yang memenuhi persyaratan selanjutnya dapat mempersiapkan berkas-berkas usulan dan surat lamaran yang ditujukan kepada kepala Disdikbud beserta berkas administrasi yang lainnya sesuai dengan Permendiknas.²³

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Esra mengenai administrasi yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 28 tahun 2010, yaitu:

Persyaratan yang harus dimiliki oleh guru-guru sebagai calon kepala sekolah kami sesuai dengan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 yang ada yaitu: memiliki ijazah S1, golongan minimal IIIc, pengalaman mengajar minimal 5 tahun.²⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Rohani (salah seorang calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi) yang mengatakan bahwa:

²²Wawancara dengan bapak Esra (Wakil Sekretaris TIM Rekrutmen Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 13 September 2015, pukul 08:00 WIB.

²³Wawancara dengan ibu Mimi Noryani (Perwakilan Kepala Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 7 Agustus 2015, pukul 15:22 WIB

²⁴ Wawancara dengan bapak Esra (Wakil Sekertaris TIM Rekrutmen Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 13 September 2015, pukul 08:00 WIB.

Persyaratan dari seorang guru yang diusulkan untuk mengikuti rekrutmen cakerpada adalah pendidikan strata satu, masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun dan pangkat serendah-rendah III c.²⁵

Dalam hal pengusulan tersebut dilakukan dalam dua cara, yaitu manual dan *online* situs “Padamu Negeri”. Berikut kutipan wawancaranya:

Selain secara manual pengusulan juga melalui data *online* Padamu Negeri, kemudian data yang telah diisi melalui *online* tersebut akan di verifikasi oleh tim atau panitia rekrutmen untuk melihat kelengkapannya. Apabila telah dianggap lengkap dan memenuhi standar dari Permendiknas nomor 28 tahun 2010, maka akan dicetak dan dilampirkan bersamaan dengan berkas administrasi secara khusus untuk didaftarkan agar bisa mengikuti seleksi akademik sampai tuntas.²⁶

Tahapan ketiga dari pelaksanaan rekrutmen kepala sekolah, yaitu:

Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen, yaitu: sebagaimana yang telah tercantum dalam Permendiknas nomor 28 tahun 2010 pasal 2 ayat 2, baik itu secara umum dan khususnya harus terpenuhi.²⁷

Data dari Disdikbud tahun 2014 guru yang mendaftar untuk ikut seleksi calon kepala sekolah sebanyak 40 orang dari semua jenjang, setelah melewati seleksi administrasi dan kelengkapan berkas, maka 40 orang guru tersebut dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Daftar nama beserta kelengkapan berkasnya akan dikirim ke LPMP untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara serta pendidikan dan pelatihan dengan jadwal yang telah disesuaikan.

²⁵Wawancara dengan ibu Rohani (Salah seorang calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi), Kediaman ibu Rohani, tanggal 10 Agustus 2015, pukul: 14:00 WIB.

²⁶Wawancara dengan bapak RachmatWinarso (Staf TIM rekrutmen calon kepala sekolah), kantor Disdikbud, Jumat, 11 September 2015, Pukul 15:00WIB

²⁷*Ibid.*

TABEL 4.2
DAFTAR NAMA KEPALA SEKOLAH YANG TELAH LULUS SELEKSI
ADMINISTRASI DI DISDIKBUD PALANGKA RAYA

No	Nama	Jenjang Pendidikan		
		SD	SMP	SMA/SMK
1	SAMEATIE,S.Pd	√		
2	Hj.SITI MARPIAH, S.Pd	√		
3	JONHERMADI,S.Pd	√		
4	HARTANI,S.Pd	√		
5	LEWIE,S.Pd	√		
6	PRIMAWATIE,S.Pd, M.M	√		
7	SUCIYANIE,S.Pd	√		
8	JARMO,S.Pd	√		
9	TRIJOKO,S.Pd	√		
10	Hj.MUYASYAROH,S.Pd	√		
11	TARIE,S.Pd	√		
12	MARIATUL KIPTIAH,S.Pd	√		
13	NEKOPELY,S.Pd	√		
14	ICAI,S.Pd	√		
15	BETI SARI,S.Pd	√		
16	SUPIK SUMAWATI, S.Pd	√		
17	MARGINI, S. Pd	√		
18	TAWUN, S. Pd	√		
19	RETNO PRILINA LETI, S.Pd, M.Pd		√	
20	H. MUHAMAD AHMADI, S.Pd		√	
21	BALIMBUK, S.Pd		√	
22	GUNARHAD, S.Pd, M.Pd		√	
23	Dra. HENI PUJIATI		√	
24	TANGGARSON, S.Pd		√	
25	SUSIDA, S.Pd		√	
26	JAINUDDIN, S.Pd		√	
27	HELGI, S.Pd		√	
28	ELOK MARGARETH, SE		√	
29	YANKRIS, S.Pd		√	
30	Dra. SULIANSI, MM			√
31	Dra. SUMIATY, MM			√
32	Dra. Hj. ROHANI, M.Pd			√
33	MARETE, S.Pd, M.Pd			√
34	M. RIFANI, S.Pd			√
35	ADRIANSYAH, S.Pd, M.Pd			√
36	YULIANTO, S.Pd			√
37	TARANTANG, S. Pd			√
38	RUANDA S. Pd, MM			√
39	INDRIMEILLA, S. Pd, M. Si			√
40	IYAT MERI KRISMAS, S. Pd			√

Sumber: Dokumen LPMP “Hasil Seleksi Administrasi” Tahun 2014.

Data tersebut dirinci dalam tingkatan jenjang sekolah yaitu Sekolah Dasar (SD) sebanyak 18 guru, tingkat Sekolah Menengah pertama (SMP) sebanyak 11 orang guru dan jenjang sekolah Menengah Atas sebanyak 11 orang.

Berdasarkan hasil observasi di LPMP diketahui bahwa tim penanggung jawab bekerja dengan maksimal hal ini dilihat dari berkas-berka calon kepala sekolah yang telah lulus secara administrasi untuk mengikuti seleksi akademik. Selain berkas-berkas yang ada di ruangan kerja yang sudah disiapkan tim juga bekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.²⁸

LPMP adalah pemilik kewenangan dalam penyiapan calon kepala sekolah. Proses pelaksanaannya dilakukan oleh tim pelaksana seleksi akademik dan pelaksana pendidikan dan pelatihan. Unsur yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ini adalah asesor dan master trainer serta dosen yang memiliki sertifikat master trainer dan penanggung jawab diklat.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam seleksi akademik dan diklat yaitu: (1) Penguasaan kompetensi calon kepala sekolah yang dilihat dari beberapa tes, seperti: akademik dan kepemimpinan atau kekuatan calon kepala sekolah. (2) Diklat. (3) Pemberian nomor unik kepala sekolah atau sertifikat sebagai kepala sekolah bagi calon kepala sekolah yang telah lulus diklat.²⁹

²⁸Observasi di LPMP jalan Tjilik Riwut KM. 4 Tanggal 1 Mei 2015

²⁹Dokumen LPMP, Tahun 2014.

Berikut ini paparan wawancara dari bapak Hasan terkait dengan penguasaan kompetensi calon kepala sekolah, yaitu:

Yang pertama itu adalah penguasaan kompetensi calon kepala sekolah kami lakukan dengan cara seleksi akademik melalui penilaian potensi kepemimpinan (PPK) untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan, atau daya kepemimpinan caktep yang dimilikinya, apakah bisa berkembang atau tidak. Dalam penilaian potensi ini kami tidak melihat dari riwayat pendidikan dan perkuliahannya, tetapi yang kami lihat dari potensi kemampuan akademiknya yang mencakup empat instrumen yaitu: instrumen 1a, 1b, instrumen 2 dan 3.³⁰

Berikut ini penjelasan lebih lanjut dari bapak Gazali mengenai instrumen 1a, 1b, sebagai berikut:

Instrumen 1a itu tentang respon situasional, artinya calon kepala sekolah dilihat kemampuannya dan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah yang mendesak agar dapat terselesaikan dengan baik, kemudian instrumen 1b itu tentang respon situasional, artinya penilaian tersebut untuk melihat kemampuan calon kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah yang besar dan cara beliau dalam memecahkan masalah besar tersebut.³¹

Penjelasan tentang instrumen 2 dan 3 ditambahkan kembali oleh bapak Hasan, sebagai berikut:

Kalau instrumen 2 itu tentang kreativitas dan pemecahan masalah, seperti: penilaian untuk mengetahui kemampuan caktep dalam menyelesaikan masalah secara kreatif dengan cara kami, memberikan skenario dan soal-soal untuk dikritisi. Kalau instrumen 3 itu tentang wawasan kepemimpinan dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti-bukti, artinya: caktep diminta untuk menemukan situasi bermasalah, apa saja masalahnya, dan bagaimana dia mampu untuk menyelesaikannya secara sistematis dan logis.³²

³⁰Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

³¹Wawancara dengan bapak Gazali, (Penanggung Jawab Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Jum'at, 7 Agustus 2015, Pukul 15:02 WIB

³²Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

Informasi selanjutnya dari bapak Asyhadi mengenai hasil penilaian dari instrumen 1a, 1b, 2 dan 3 menggunakan kriteria-kriteria. Berikut kutipan wawancaranya:

Penilaian dalam seleksi akademik dikategorikan dalam tiga kriteria kelulusan, yaitu kurang memuaskan (KM), memuaskan (M) dan sangat memuaskan (SM). Peserta bisa dinyatakan lulus seleksi akademik, jika mendapatkan nilai minimal memuaskan (M) untuk keempat instrumen tersebut.³³

Setelah terlaksananya proses seleksi akademik, maka dapat dinyatakan dua puluh orang calon kepala dengan kriteria memuaskan dan lulus seleksi akademik tersebut, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.3 DAFTAR NAMA CAKEP YANG TELAH LULUS SELEKSI AKADEMIK DI LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama	Nilai Akhir
1	Tri Joko, S. Pd	Layak
2	Hartani, S. Pd	Layak
3	Muyasyaroh	Layak
4	Tarie	Layak
5	Nekopeli, S. Pd	Layak
6	Primawati, S. Pd	Layak
7	Jarmo, S. Pd	Layak
8	Yankris, S. Pd	Layak
9	Gunarhard, S. Pd, M. Pd	Layak
10	Balimbuk, S. Pd	Layak
11	Retno Priliani Leti, M. Pd	Layak
12	Dra. Heni Pujiyati	Layak
13	Helgi	Layak
14	Dra. Hj. Rohani, M. Pd	Layak
15	Marete	Layak
16	M. Rifani, S. Pd	Layak
17	Dra. Suliansi, MM	Layak
18	Indrimeilla, S. Pd, M.Pd	Layak
19	Tarantang, S. Pd	Layak
20	Yulianto, S. Pd	Layak

Sumber: Dokumen LPMP “Hasil Seleksi Akademik” Tahun 2014.

³³Wawancara dengan bapak Asyhadi (Penanggung Jawab Data TIM Rekrutmen LPMP), Kantor LPMP, Senin 14 September 2015, Pukul 08:00 WIB.

Guru yang telah lulus seleksi akademik sebagai calon kepala sekolah tersebut berjumlah dua puluh orang terbagi dari jenjang sekolah yaitu tingkat Sekolah Dasar berjumlah 11 orang, Sekolah Menengah Pertama 2 orang dan Sekolah Menengah Atas 7 orang.

Tahap kedua dilanjutkan pada pemberian pendidikan diklat calon kepala sekolah. Diklat merupakan kegiatan pemberian pengalaman pendidikan secara teori maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial sesuai Permendiknas nomor 13 tahun 2007.

Berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Gazali tentang diklat cakep di LPMP, yaitu:

Diklat dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka yang kurun waktunya minimal seratus jam dan praktik pengalaman lapangan dalam waktu tiga bulan atau dua ratus jam.³⁴

Dalam hal ini dijelaskan oleh bapak Hasan mengenai diklat tatap muka dan praktik lapangan yang harus diikuti oleh cakep yang berupa *In-service learning* 1 disebut IN-1, yaitu:

Diklat tatap muka dan praktik lapangan cakep dilakukan melalui tahapan dan model pendidikan dan pelatihan, sebagai berikut: *In-service learning* 1 disebut IN-1 yaitu: pembelajaran melalui kegiatan tatap muka dalam waktu 70 jam @ 45 menit sebanyak 8 hari, materi IN-1 mencakup materi umum, materi inti dan materi penunjang diberikan oleh pemateri yang dikenal dengan sebutan *Master Trainer*.³⁵

³⁴Wawancara dengan bapak Gazali, (Penanggung Jawab Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Jum'at, 7 Agustus 2015, Pukul 15:02 WIB.

³⁵Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

Bapak Asyhadi menambahkan mengenai diklat tatap muka dan praktik lapangan yang harus diikuti oleh cakep yang berupa *the job learning* (OJL), yaitu:

Pada akhir pertemuan IN-1 peserta cakep akan menyusun rencana tindakan yang akan diimplementasikan pada saat *on the job learning* (OJL). Penyusunan rencana tindakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi diri yang dicerminkan pada hasil AKPK. *On The Job Learning* (OJL) artinya: pelaksanaan rencana tindakan yang telah disusun pada saat IN-1, kemudian diimplementasikan di dua tempat yaitu sekolah sendiri sebanyak seratus lima puluh jam dan sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau sederajat sebanyak lima puluh jam dalam kurun waktu tiga bulan setara dengan dua ratus jam pelajaran.³⁶

Berikut ini diungkapkan oleh bapak Hasan tentang tujuan dilaksanakannya OJL bagi cakep yang mengikuti diklat, yaitu:

Tujuan dari OJL untuk mendapatkan pengalaman belajar dan pengalaman praktik-praktik yang baik tentang kompetensi kepala sekolah dengan cara mempraktekan hasil dari IN-1 atau sesuai dengan pelaksanaan perencanaan.³⁷

Bapak Gazali menambahkan mengenai DIKLAT tatap muka dan praktik lapangan yang harus diikuti oleh cakep yang berupa *In Service Learning 2* disebut dengan IN-2, yaitu:

In Service Learning 2 disebut dengan IN-2, dalam kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap portofolio atau hasil yang telah didapat dari OJL dan presentasinya dalam konteks peningkatan kompetensi calon kepala sekolah tersebut dengan waktu empat hari (tiga puluh jam).³⁸

Tahap terakhir adalah pemerolehan sertifikat kepala sekolah, akhir dari diklat cakep ini adalah mendapatkan sertifikat kepala sekolah sebagai

³⁶Wawancara dengan bapak Asyhadi (Penanggung Jawab Data TIM Rekrutmen LPMP), Kantor LPMP, Senin 14 September 2015, Pukul 08:00 WIB.

³⁷Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

³⁸Wawancara dengan bapak Gazali, (Penanggung Jawab Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Jum'at, 7 Agustus 2015, Pukul 15:02 WIB.

bukti formal dan pengakuan yang diberikan kepada guru yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, guru tersebut telah dinyatakan lulus program diklat cakupannya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Sertifikat kepala sekolah yang diberikan ditanda-tangani oleh kepala BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi nomor unik kepala sekolah (NUKS), dikeluarkan dan dicatat dalam database nasional oleh LPPKS sebagai penjamin mutu penyelenggaraan PPKS/M.

Pelaksanaan rekrutmen baik yang dilakukan pada LPMP maupun Disdikbud dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Perencanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah

1) Disdikbud Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mimi Noryani dapat diketahui bahwa perencanaan tim rekrutmen calon kepala sekolah oleh Disdikbud Kota Palangka Raya melalui tahapan pertamanya, yaitu:

SK-SK yang dikeluarkan oleh kepala Disdikbud dengan menunjuk dari masing-masing kepala bidang yaitu: Dikdas (pendidikan dasar), Dikmen (pendidikan menengah, SMA dan SMK), setelah SK keluar maka dilanjutkan dengan rapat tim. Peran kami itu dari menyaring nama guru, data guru yang dilihat berdasarkan kemampuan dan manajerialnya, kemampuan pembinaan dan akhirnya itulah yang disaring.³⁹

Hal senada dibenarkan oleh bapak Esra yang mengatakan bahwa:

Peran serta kepala Disdikbud dalam perencanaan rekrutmen ini, sebagai pemimpin rapat dalam kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh tim rekrut kemudian hasilnya akan diambil beberapa poin

³⁹Wawancara dengan ibu Mimi Noryani (Perwakilan Kepala Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 7 Agustus 2015, pukul 15:22 WIB.

penting, setelah itu tim rekrut bekerja untuk mengumpulkan bahan dan mengumpulkan segala macam hal yang dianggap penting, barulah setelah itu dilaporkan ke kepala Disdikbud.⁴⁰

Tahap selanjutnya adalah penyebaran pengumuman lowongan penerimaan calon kepala sekolah di seluruh sekolah di Kota Palangka Raya, namun pengumuman tersebut tidak melalui surat kabar atau media informatika lainnya tetapi disebarakan melalui surat-surat yang beredar ke sekolah masing-masing.

Berikut ini kutipan wawancaranya:

Kami tidak menyebar pengumuman penerimaan cakep itu di suratkabar tetapi hanya surat yang kami bagikan ke masing-masing sekolah, kemudian dari sekolah mengusulkan ke kami nama-namanya.⁴¹

Menurut bapak Rachmat Winarso selaku staf dari tim rekrut cakep

Disdikbud tentang tugasnya adalah:

Kami staf tim rekrutmen tu bertugas mempersiapkan pendataan dengan cara situs *online* Padamu Negeri dan secara manual yang syaratnya sesuai dengan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang guru dan dosen, kemudian kami juga memilih dan memilah berkas cakep tersebut berdasarkan instrumen yang ada untuk menentukan kelengkapan administrasi cakep, dan bila tidak lengkap, maka akan dibantu secara *online*.⁴²

Perencanaan yang dilakukan oleh Disdikbud dalam rekrutmen calon kepala sekolah ini adalah melalui SK yang dikeluarkn oleh Kepala Disdikbud kepada masing-masing bidang pendidikan yaitu bidang Pendidikan Sekolah

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Esra (Wakil Sekretaris TIM Rekrutmen Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 13 September 2015, pukul 08:00 WIB.

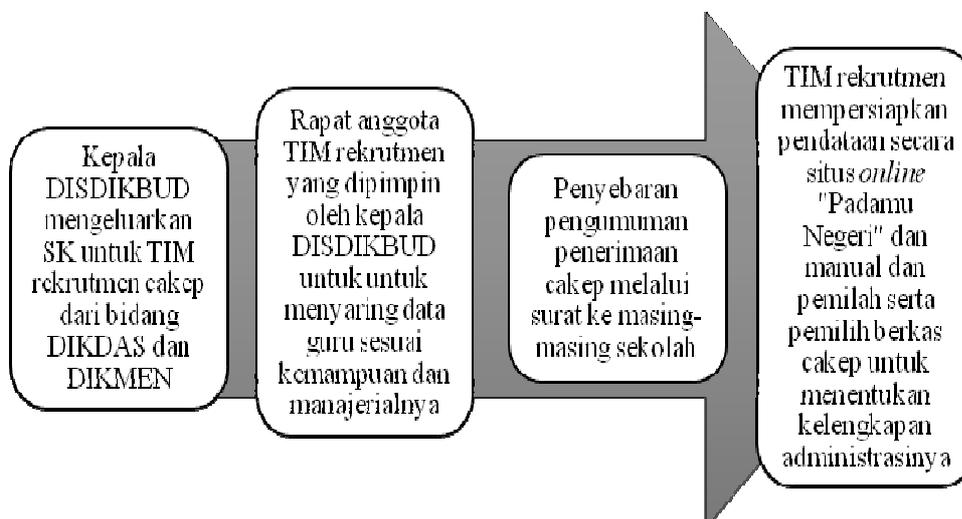
⁴¹Wawancara dengan ibu Mimi Noryani (Perwakilan Kepala Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 7 Agustus 2015, pukul 15:22 WIB.

⁴²Wawancara dengan bapak Rachmat Winarso (Anggota TIM rekrutmen calon kepala sekolah), kantor Disdikbud, Jumat, 11 september 2015, Pukul 15:00 WIB.

Dasar dan bidang Pendidikan Sekolah Menengah kemudian ditindaklanjuti dengan rapat anggota tim rekrutmen untuk menyiapkan prosedur penerimaan guru serta syarat-syarat yang harus mereka penuhi baik secara administrasi maupun secara online situs Padamu Negeri.

Berikut ini alur perencanaan dari rekrutmen calon kepala sekolah oleh Disdikbud, yaitu:

GAMBAR 4.3
ALUR PERENCANAAN REKRUTMEN CAKEP OLEH DISDIKBUD



2) LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Tahapan pertama perencanaan rekrutmen di LPMP adalah pembentukan tim melalui rakor prodef, dimana Disdikbud Kota Palangka Raya bertugas sebagai tim seleksi administrasi dan LPMP sebagai tim seleksi akademik dan panitia pelaksana yang di dalamnya terdiri dari tenaga ahli, seperti: asesor dan *master trainer*.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Asyhadi, yaitu:

Persiapan tim dulu tahap pertamanya yang diawali dengan rakor prodef. Untuk Disdikbud mereka hanya menerima undangan dari LPMP untuk menghadiri rakor tersebut dan dalam rakor itulah

diputuskan bahwa tim Disdikbud bertugas sebagai seleksi administrasi dan LPMP bertugas sebagai seleksi akademik dan diklat.⁴³

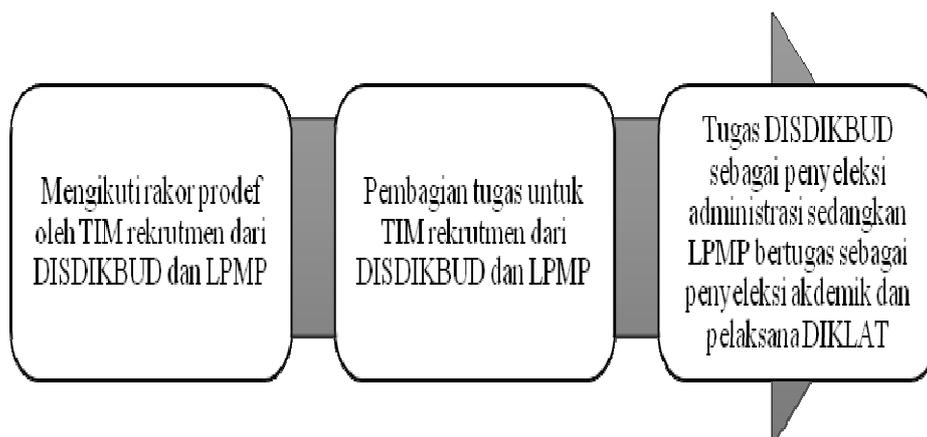
Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan mengenai tahapan perencanaan tim rekrutmen cakep di LPMP, yaitu:

Perencanaan di dalam rekrutmen cakep ini, LPMP ditugaskan sebagai penyeleksi akademik dan diklat. Jadi untuk merekrut cakepnya melalui Disdikbud.⁴⁴

Kemudian dipertegas kembali oleh bapak Gazali selakupenanggung jawab pelaksana rekrutmen di LPMP yang menyatakan bahwa:

Perencanaan rekrutmen ini dilaksanakan melalui anggaran prodef, setelah itu akan dibatasi masing-masing koutanya berjumlah 40 orang untuk seleksi administrasi dan akademik, kemudian mengikuti diklat yang jumlah maksimalnya hanya sebanyak 20 orang. Padahal ada kemungkinan jumlah cakep yang lulus administrasi dan akademik lebih dari 20 orang tetapi karena permasalahan dana, maka diklat hanya dapat diikuti maksimal 20 orang saja. Kesimpulannya adalah seleksi administrasi dan seleksi akademik sebanyak 40 orang dan diklat hanya dapat diikuti oleh 20 orang cakep saja karena permasalahan pendanaan.⁴⁵

GAMBAR 4.4
ALUR PERENCANAAN REKRUTMEN CAKEP OLEH LPMP



⁴³Wawancara dengan bapak Asyhadi, (Penanggung jawab Data TIM Rekrut LPMP), kantor LPMP, Senin 14 September 2015, Pukul 08:00 WIB.

⁴⁴Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

⁴⁵Wawancara dengan bapak Gazali, (Penanggung Jawab Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Jum'at, 7 Agustus 2015, Pukul 15:02 WIB.

b. Pengorganisasian Rekrutmen Calon Kepala Sekolah

Pengorganisasian di sebuah lembaga merupakan fungsi kedua dari manajemen setelah perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk menetapkan siapa saja yang terlibat dan memiliki kewenangan pada struktur organisasi tersebut.

Berikut ini akan penulis paparkan tentang pengorganisasian di masing-masing kedua lembaga tersebut, yaitu: Disdikbud Kota Palangka Raya dan LPMP Provinsi Kalimantan Tengah.

1) Disdikbud Kota Palangka Raya

Menurut Ibu Noor Hikmah selaku kepala Disdikbud bahwa pengorganisasian rekrutmen calon kepala sekolah yang dilakukan dalam penerimaan calon kepala sekolah di Kota Palangka Raya. Pengorganisasian dilakukan oleh LPMP dengan cara memanggil kepala Disdikbud untuk mengikuti rakor prodef, kemudian setelah itu kepala Disdikbud melakukan rapat dengan stafnya untuk menyerahkan hasil dari rakor prodef untuk dibahas pada rapat bersama stafnya agar dapat dilaksanakan sebagaimana aturan main yang ada di LPMP.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Esra yang mempertegas wawancara dengan kepala Disdikbud mengenai pengorganisasian rekrutmen cakep, yaitu:

Pengorganisasian dilakukan secara khusus dalam rakor prodef tersebut, Disdikbud hanya menerima undangan dari LPMP dan Disdikbud wajib melaksanakan dengan baik sesuai juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) yang telah diberikan LPMP.

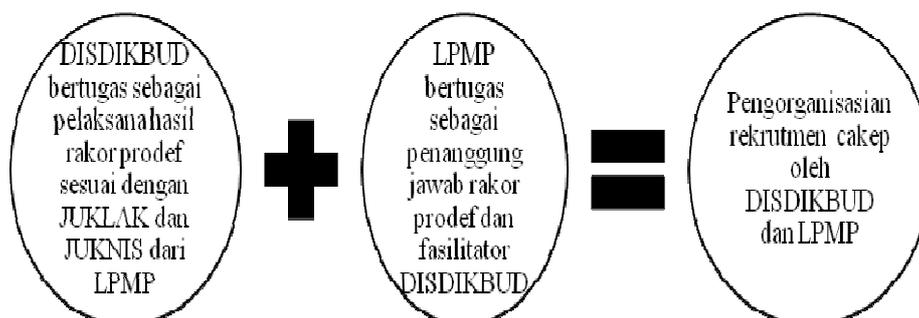
LPMP memfasilitasi Disdikbud tentang bagaimana cara mengangkat cakep sesuai dengan aturannya.⁴⁶

2) LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Pengorganisasian yang dilakukan LPMP dalam penerimaan calon kepala sekolah di Kota Palangka Raya dengan diawali rakor prodef. Berikut kutipan wawancaranya:

Pengorganisasian dilakukan secara khusus dalam rakor prodef tersebut, dimana LPMP sebagai penanggung jawab prodef dan Disdikbud hanya diminta oleh LPMP untuk menghadiri rakor prodef. Disdikbud hanya melaksanakan surat panggilan dari LPMP.⁴⁷

GAMBAR 4.5
PROSES PENGORGANISASIAN REKRUTMEN CAKEP OLEH
DISDIKBUD DAN LPMP



Pada hakikatnya pelaksanaan rekrutmen calon kepala sekolah di kedua lembaga ini, memiliki perannya masing-masing, yaitu: Disdikbud berperan sebagai penganalisis kebutuhan bagi LPMP dan LPMP sebagai penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen calon kepala sekolah di Kota Palangka Raya.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Esra (Wakil Sekertaris TIM Rekrutmen Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 13 September 2015, pukul 08:00 WIB.

⁴⁷Wawancara dengan bapak Asyhadi, (Penanggung jawab Data TIM Rekrut LPMP), kantor LPMP, Senin 14 September 2015, Pukul 08:00 WIB.

1) Disdikbud Kota Palangka Raya

Ibu Mimi Noryani menyatakan bahwa peran Disdikbud sebagai penganalisis kebutuhan kepala sekolah untuk dua tahun yang akan datang. Analisis itulah yang kemudian dijadikan patokan proyeksi kebutuhan kepala sekolah yang harus dipersiapkan. Proyeksi kebutuhan ini harus dilakukan secara cermat agar kebutuhan kepala sekolah dapat terpenuhi.

Analisis kebutuhan disusun dengan berdasarkan pada data-data tentang jumlah sekolah berdasarkan jenjang, penambahan dan pengurangan jumlah sekolah, data kepala sekolah berdasarkan usia, masa jabatan, mutasi dan pemberhentian.

Berikut ini kutipan wawancaranya:

Pelaksanaan cakerp itu berdasarkan analisis kebutuhan dari Disdikbud dan sesuai surat dari LPMP bahwa Disdikbud merekrut cakerp melalui seleksi berkas atau administrasinya saja selanjutnya adalah urusan mereka LPMP.⁴⁸

Hal senada diutarakan oleh bapak Esra selaku wakil sekretaris tim rekrutmen LPMP yang juga mengatakan bahwa:

Pelaksanaan cakerp itu berdasarkan analisis kebutuhan dari Disdikbud dan sesuai surat dari LPMP bahwa Disdikbud merekrut cakerp melalui seleksi berkas atau seleksi administrasi.⁴⁹

Tahap selanjutnya setelah proyeksi analisis kebutuhan adalah pengusulan guru sebagai calon kepala sekolah. Pengusulan guru tersebut

⁴⁸Wawancara dengan ibu Mimi Noryani (Perwakilan Kepala Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 7 Agustus 2015, pukul 15:22 WIB.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Esra (Wakil Sekretaris TIM Rekrutmen Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 13 September 2015, pukul 08:00 WIB.

dimulai dengan pengumuman melalui surat ke sekolah masing-masing, identifikasi guru potensial, penyiapan berkas usulan, dan pengajuan usulan calon kepala sekolah. Guru yang potensial dapat diusulkan untuk menjadi calon kepala sekolah kepada Disdikbud oleh kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi melalui penilaian kelengkapan dokumen atau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Permendiknas nomor 28 tahun 2010 pasal 2 ayat 2 dan juga didukung dengan dokumen administratif lainnya (dikenal dengan sebutan “persyaratan khusus”).

Berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Rachmat Winarso selaku TU tim rekrutmen Disdikbud, yaitu:

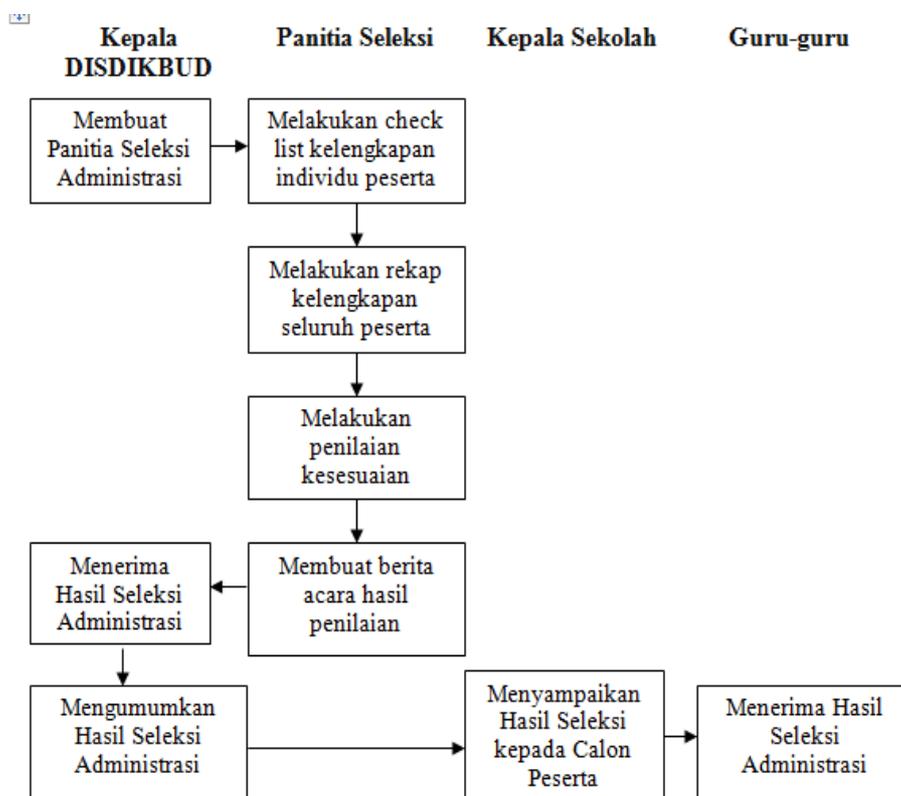
Pengusulan itu dilakukan setelah analisis proyeksi kebutuhan, dimana para kepala sekolah terdahulu akan mengusulkan para gurunya yang potensial. Kami dari Disdikbud akan menyebarkan pengumuman ke sekolah-sekolah dan tinggal sekolahnya masing-masing saja lagi yang akan mengirimkan utusannya yang dianggap potensial untuk menjadi cakep.⁵⁰

Saat proses pengusulan oleh kepala sekolah seluruh dokumen, baik persyaratan umum dan khusus harus dijilid dengan menggunakan cover sesuai jenjang sekolah masing-masing kecuali syarat secara khusus untuk poin rekomendasi kepala sekolah dan pengawas yang harus tertutup dan disegel. Untuk cover SD berwarna merah, SMP berwarna hijau dan SMA/SMK berwarna kuning.⁵¹

⁵⁰Wawancara dengan bapak Rachmat Winarso (Staf TIM rekrutmen calon kepala sekolah), kantor Disdikbud, Jumat, 11 September 2015, Pukul 15:00 WIB

⁵¹Dokumen Disdikbud tahun 2014.

GAMBAR 4.6
ALUR PROSES SELEKSI ADMINISTRATIF DI DISDIKBUD



2) LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Gazali menyatakan bahwa untuk pelaksanaan rekrutmen calon kepala sekolah tidak disebarakan melalui media cetak tetapi hanya media *onlinesitus* “Padamu Negeri” dan melalui surat-surat yang telah Disdikbud edarkan ke sekolah masing-masing sesuai jenjangnya.

Berikut ini kutipan wawancaranya:

Rekrut cakep ini melalui *online* padamu negeri, kalau melalui *pamplet* sih tidak ada, dalam hal ini harus memenuhi syarat sesuai Permendiknas nomor 28 tahun 2010 ayat 2 pasal 2 dan silahkan mendaftarnya ke Disdikbud Kota Palangka Raya.⁵²

⁵²Wawancara dengan bapak Gazali, (Penanggung Jawab Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Jum’at, 7 Agustus 2015, Pukul 15:02 WIB.

Bapak Hasan menambahkan bahwa setelah mengacu pada Permendiknas nomor 28 tahun 2010 pasal 2 ayat 2, maka ada syarat khusus yang juga harus dipenuhi oleh semua calon kepala sekolah sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Berikut ini hasil wawancaranya, yaitu:

Disdikbud melaksanakannya harus sesuai/mengacu pada Permendiknas nomor 28 tahun 2010, itulah yang harus dipenuhi pelamar dan mungkin ada tambahan secara khusus dari Disdikbud yang harus dipenuhi. LPMP melaksanakan seleksi akademik dan mengadakan diklat sampai cakep dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat sebagai kepala sekolah. Jadi peran LPMP hanyalah sebagai mitra/kordinator pelaksana karena LPMP mempunyai tenaga ahli dalam seleksi calon kepala sekolah ini.⁵³

Sebelum pelaksanaan seleksi akademik, maka akan dilakukan penguasaan awal kompetensi calon kepala sekolah melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK). Hasil AKPK diolah dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang bersifat individual dan merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala sekolah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah.⁵⁴

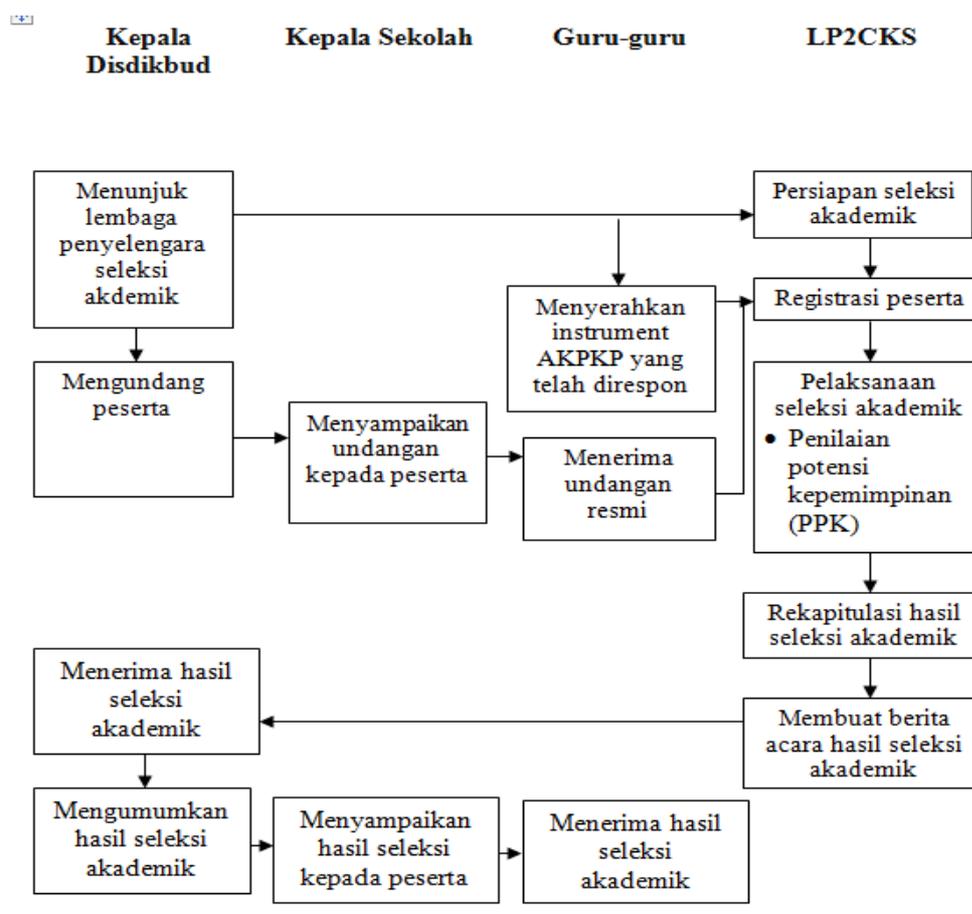
Tahap selanjutnya adalah seleksi akademik yang dilakukan melalui Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK), yaitu: pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan atau daya kepemimpinan yang

⁵³ Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

⁵⁴ Dokumen LPMP tahun 2014.

dimiliki oleh caktep yang memungkinkan untuk dikembangkan. PPK ini mencakup empat instrumen.⁵⁵

GAMBAR 4.7
ALUR PROSES SELEKSI AKADEMIK DI LPMP



Tahap selanjutnya adalah pemberian diklat kepada calon kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus berkas administrasi oleh Disdikbud. Diklat ini merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran secara teori dan praktik untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial,

⁵⁵*Ibid.*

kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi calon kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas tahun 2007.

Pelaksanaan diklat oleh LPMP bagi calon kepala sekolah. Diklat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- a) Tatap muka disebut dengan *in service learning* 1 (IN-1) dalam durasi minimal 70 jam @ 45 menit.
- b) *On the Job Learning* (OJL) dalam durasi minimal 200 jam yang dilakukan 150 jam di sekolah sendiri dan 50 jam di sekolah lain .
- c) *In Service Learning* 2 (IN-2) dalam durasi minimal 30 jam @ 45 menit yang diselenggarakan dalam bentuk penilaian portofolio dan presentasi refleksi hasil kegiatan OJL.

Berikut ini kutipan wawancaranya dengan bapak Hasan tentang pemberian diklat oleh lembaga LPMP, yaitu:

Setelah dites (seleksi akademik), maka dilaksanakanlah diklat yang dilaksanakan oleh Widyaiswara selama kurun waktu yang sudah ditentukan dengan narasumber dari pusat dan dari daerah dengan cara hasil penilaiannya kompeten atau tidak kompeten.⁵⁶

Tahap terakhir adalah pemberian sertifikat kepala sekolah kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Sertifikat tersebut berisikan nomor unik kepala sekolah yang dikeluarkan dan dicatat dalam *database* nasional dan ditandatangani oleh BPSDMTK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

⁵⁶Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

Berikut ini kutipan wawancaranya dengan bapak Gazali tentang pemberian sertifikat kepala sekolah kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yaitu:

Pemberian sertifikat setelah berhasil mengikuti seleksi akademik dan diklat, setelah mendapatkan sertifikat mereka cakep tidak langsung dilantik sebagai kepala sekolah tetapi harus melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) masing-masing Kabupaten.⁵⁷

Berdasarkan hasil paparan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen cakep di Kota Palangka Raya pada hakikatnya dipegang penuh oleh LPMP dalam hal penyeleksian akademik dan pemberian diklat oleh *master trainer*, namun peran Disdikbud juga tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan rekrutmen cakep tersebut karena untuk penyeleksian berkas administrasi dilakukan oleh Disdikbud dan setelah itu pihak LPMP akan menerima 40 orang pelamar cakep hasil seleksi administrasi dari Disdikbud untuk mendapatkan 20 orang cakep yang lulus seleksi akademik untuk kemudian melanjutkan mengikuti DIKLAT oleh tenaga ahli (*master trainer*).

c. Pengawasan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah

1) Disdikbud Kota Palangka Raya

Menurut pihak Disdikbud mengenai pengawasan rekrutmen calon kepala sekolah Kota Palangka Raya bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan, namun pihak Disdikbud hanya sebagai penyeleksi berkas saja dan

⁵⁷Wawancara dengan bapak Gazali, (Penanggung Jawab Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Jum'at, 7 Agustus 2015, Pukul 15:02 WIB.

untuk tugas pengawasan itu hanya dilakukan oleh pihak LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu Mimi Noryani yaitu:

Tidak ada pengawasan secara khusus yang dilakukan dalam perekrutan calon kepala sekolah di kota Palangka Raya. Tim hanya bekerja menyeleksi berkas administrasi dan hasilnya akandiserahkan kepada kepala Disdikbud artinya kepala Disdikbud hanya menerima hasil dari kerja tim pelaksana kegiatan.⁵⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak Esra bahwa tidak pengawasan yang dilakukan oleh Disdikbud dalam hal pengawasan rekrutmen calon kepala sekolah di Kota Palangka Raya, yaitu:

Tidak ada pengawasan kerja tim rekrutmensecara khusus dari kepala Disdikbud, beliau hanya meminta laporan saja apakah pekerjaan tim rekrutmen sesuai dengan juklak dan juknisnya atau tidak.⁵⁹

Hal senada juga diutarakan oleh bapak Rachmat Winarso, bahwa:

Pengawasan langsung dilakukan oleh panitia seleksi yang dimulai dengan pengawasan berkas administrasi cakep yang masuk panitia hingga keputusan hasil seleksi administrasi cakep oleh Disdikbud sampai berkas tersebut diserahkan ke LPMP.⁶⁰

2) LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Menurut bapak Gazali bahwa dalam kegiatan pengawasan ini tidak ada cara khusus tetapi dengan cara melihat hasil laporan dari alumni calon kepala sekolah yang telah lulus diklat dan telah mendapatkan sertifikat kepala

⁵⁸Wawancara dengan ibu Mimi Noryani (Perwakilan Kepala Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 7 Agustus 2015, pukul 15:22 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Esra (Wakil Sekertaris TIM Rekrutmen Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 13 September 2015, pukul 08:00 WIB.

⁶⁰Wawancara dengan bapak Rachmat Winarso (Staf TIM rekrutmen calon kepala sekolah), kantor Disdikbud, Jumat, 11 september 2015, Pukul 15:00WIB.

sekolah. Namun, peran pemerintahan daerah masing-masing juga sangat menentukan dalam pengangkatan kepala sekolah tersebut karena untuk diangkat menjadi kepala sekolah di daerahnya masing-masing tergantung lagi pada kebijakan dari pemerintah setempat, seperti: kebijakan dari walikota atau bupatinya masing-masing. Berikut kutipan wawancaranya:

Tidak ada cara khusus dalam pengawasan karena kami dan hanya melihat laporan dari alumni cakep yang telah diangkat menjadi kepek, dan harapan LPMP kan setelah mengikuti diklat ini dan dianggap lulus, maka mereka wajib menjadi kepek. Namun, kenyataan tidak dan keputusannya tergantung kebijakan walikota dan bupati dari daerah masing-masing lagi. Semua nama yang telah ditetapkan menjadi kepala sekolah tersebut akan kami laporkan kepusat dan mereka akan mendapatkan nomor unik kepala sekolah bahwa mereka layak untuk menjadi kepek.⁶¹

Informasi lainnya juga ditambahkan oleh bapak Asyhadi tentang pengawasan yang dilakukan oleh LPMP terkait dengan rekrutmen calon kepala sekolah, yaitu:

Kalau dari segi pelaksanaan sih hanya melalui kesiapan panitia, apakah ada yang kurang untuk peserta atau untuk narasumber dan apakah sudah dilaksanakan sesuai aturan mainnya atau kah tidak? bagaimana layanannya semuanya ditanyakan ke peserta, itulah biasa pengawasan yang dilakukan oleh kami selaku tim pelaksana rekrutmen cakep.⁶²

Menurut bapak Hasan dalam hal pengawasan rekrutmen calon kepala sekolah yang dilakukan oleh Disdikbud dan LPMP, sebagai berikut:

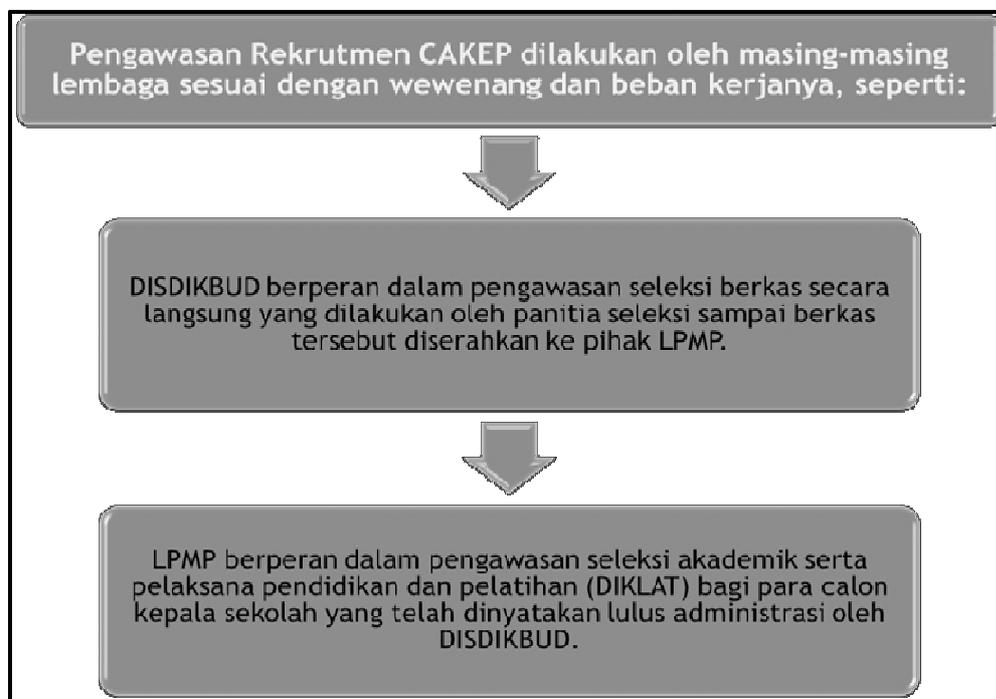
Pengawasan kami LPMP sebagai tim pelaksana akademik dan diklat, disini kami bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan seleksi akademik dan pemberian diklat bagi seluruh calon kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus berkas administrasi oleh Disdikbud.⁶³

⁶¹Wawancara dengan bapak Gazali, (Penanggung Jawab Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Jum'at, 7 Agustus 2015, Pukul 15:02 WIB.

⁶² Wawancara dengan bapak Asyhadi, (Penanggung jawab Data TIM Rekrut LPMP), kantor LPMP, Senin 14 September 2015, Pukul 08:00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

GAMBAR 4.8
PENGAWASAN REKRUTMEN OLEH DISDIKBUD KOTA PALANGKA RAYA DAN LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2. Kendala-Kendala Manajemen rekrutmen Calon Kepala Sekolah

a. Kendala-kendala Manajemen Rekrutmen Calon Kepala Sekolah di DISDIKBUD kota Palangka Raya

Dalam menjalankan sebuah kegiatan, seperti rekrutmen calon kepala tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Disdikbud. Berikut ini wawancara dengan bapak Rachmat Winarso, sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi tidak terlalu rumit, sebagian cakep yang mendaftarkan diri kurang bisa memasukan data pribadinya melalui *online* "Padamu Negeri", sehingga menyita waktu panitia untuk membantu mengisikannya lagi padahal seharusnya ingin jadi cakep itu setidaknya modalnya juga pintar IT.

Kalau bapak Rachmat Winarso mengeluhkan kendala dari segi pribadi calon kepala sekolah yang kurang bisa dalam pengisian data pribadi melalui

onlinesitus “Padamu Negeri”, maka berbeda halnya dengan bapak Esra yang mengeluhkan bahwa kendala itu lebih pada praktisi manajemen rekrutmen calon kepala sekolah yang berdampak pada hasil dari seleksi berkas administrasi kurang menentukan bahkan bisa dibilang tidak mampu menentukan untuk mendapatkan kepala sekolah yang potensial dan kredibel karena yang diukur bukan potensinya tetapi hanya kelengkapan berkas administrasi saja. Berikut ini kutipan wawancaranya:

“Apabila pendaftaran hanya melalui kelengkapan berkas saja atau yang dilihat hanya secara administrasi saja, maka itu saya rasa tidak akan bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan kandidat atau calon kepala sekolah yang memang benar-benar berpotensi dan kredibel untuk menjadi kepala sekolah. Jadi perlu rasanya ada seleksi lainnya yang lebih substantif sifatnya agar mampu mengukur kemampuan dan keahlian si cakep itu sendiri”⁶⁴

Kendala internal lainnya tentang manajemen rekrutmen calon kepala sekolah di Kota Palangka Raya juga diungkapkan oleh ibu Rohani, sebagai berikut:

“Calon kepala sekolah harus menandatangani surat perjanjian bermaterai yang isinya “Apabila telah lulus mengikuti rekrut calon kepala sekolah maka tidak akan menuntut untuk menjadi kepala sekolah”. Dengan perjanjian begitu, saya rasa apa gunanya mengikuti kegiatan rekrutmen calon kepala sekolah lagi toh lulus pun kada bisa menjamin jadi kepsek, dan apa pula gunanya tim rekrutmen calon kepala sekolah di adakan oleh Disdikbud dan LPMP karena hasil keputusannya akan diserahkan lagi pada walikota atau bupati setempat lagi”⁶⁵

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Esra (Wakil Sekertaris TIM Rekrutmen Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 13 September 2015, pukul 08:00 WIB.

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Rohani (Salah seorang calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi), Kediaman ibu Rohani, tanggal 10 Agustus 2015, pukul: 14:00 WIB.

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak Rachmat Winarso, yaitu:

“Pangkat untuk kepala sekolah yang telah lulus seleksi rekrut cakep tidak serta merta bisa diangkat langsung menjadi kepala sekolah tetapi harus mengikuti kebijakan walikota atau bupati dulu”⁶⁶

“Guru yang tidak mengikuti tes cakep bisa saja diangkat menjadi kepala sekolah asalkan dia kenal dengan orang pemerintahan, maka dia bisa naik menjadi kepala sekolah, masih ada sistem kekeluarganya (*nepotisme*)”⁶⁷

Penjelasan di atas merupakan kendala internal dari lembaga Disdikbud, maka di bawah ini akan penulis paparkan mengenai kendala eksternal dari pihak sekolah masing-masing yang penulis dapatkan informasinya dari para responden. Berikut ini kutipan wawancaranya:

“Surat edaran yang disebarkan kesekolah-sekolah itu ada yang bersifat subjektif, artinya apabila ada kepala sekolah yang tidak senang dengan guru-gurunya di sekolah padahal guru tersebut berpotensi, maka surat edaran tersebut tidak disampaikan kepadanya dan kepala sekolah akan mengutus orang lain yang disukainya, kecuali pada saat edaran itu sampai ada *monitor* langsung yang terjun ke sekolah tersebut”⁶⁸

Informasi lainnya juga ditambahkan oleh ibu Mimi Noryani mengenai kendala eksternal dari pihak sekolah, yaitu:

“Permasalahan yang masih dialami oleh tim rekrutmen di Disdikbud adalah permasalahan dana yang tidak ada untuk kegiatan seleksi administrasi dan disini kami hanya membantu pihak LPMP sebagai amal dan kami berharap di tahun yang akan datang agar kami diberikan anggaran dana tambahan agar dapat menunjang proses kegiatan seleksi administrasi supaya berjalan dengan lebih maksimal dengan kriteria seleksi yang lebih substantif bukan berdasarkan kelengkapan berkas saja”⁶⁹

⁶⁶Wawancara dengan bapak Rachmat Winarso (Staf TIM rekrutmen calon kepala sekolah), kantor DISDIKBUD, Jumat, 11 september 2015, Pukul 15:00 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Rohani (Salah seorang calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi), Kediaman ibu Rohani, tanggal 10 Agustus 2015, pukul: 14:00 WIB.

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Rohani (Salah seorang calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi), Kediaman ibu Rohani, tanggal 10 Agustus 2015, pukul: 14:00 WIB.

⁶⁹Wawancara dengan ibu Mimi Noryani (Perwakilan Kepala Disdikbud Kota Palangka Raya), kantor Disdikbud Kota Palangka Raya, tanggal 7 Agustus 2015, pukul 15:22 WIB.

b. Kendala-kendala Manajemen Rekrutmen Calon Kepala Sekolah di LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam menjalankan sebuah kegiatan, seperti rekrutmen calon kepala tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak LPMP. Berikut ini wawancara dengan bapak Hasan mengenai kendala yang dihadapi oleh LPMP yang bersifat internal, seperti kurangnya komunikasi antara Disdikbud dan LPMP karena masing-masing kedua lembaga ini memiliki perannya masing-masing dan tidak diperkenankan untuk saling mencampuri di luar kewenangan, padahal ada baiknya jika kedua lembaga ini yang sama-sama berperan dalam manajemen rekrutmen cakep di Kota Palangka Raya saling berkoordinasi demi kesepahaman dan keselarasan agar kegiatan rekrutmen dapat berjalan efektif dan efisien. Berikut kutipan wawancaranya:

“LPMP tidak ada ikut campur dalam seleksi administrasi sehingga terjadinyakurang komunikasi antara LPMP dan Disdikbud yang berdampak pada calon kepala sekolah yang telah lulus administrasi itu masih kami dianggap belum layak untuk mengikuti seleksi akademik dan diklat, seperti: misalnya masih ada kepek yang tidak menguasai IT padahal pintar IT itu perlu bagi setiap cakep untuk memudahkan kerjaan nanti saat sudah benar-benar diangkat jadi kepek”⁷⁰

Informasi lainnya juga ditambahkan oleh bapak Asyhadi tentang kendala yang dihadapi oleh LPMP tentang kendala manajemen rekrutmen calon kepala sekolah, yaitu:

“Yang telah lulus administrasi pun setelah mengikuti seleksi akademik masih ada yang dinyatakan tidak lulus, maka untuk mencari cakep yang benar benar berkompetensi itu kami harus melakukan rangking”⁷¹

⁷⁰Wawancara dengan bapak Hasan, (TIM Rekrutmen Calon Kepala Sekolah LPMP), kantor LPMP, Selasa 25 Agustus 2015, Pukul 14:27 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan bapak Asyhadi, (Penanggung jawab Data TIM Rekrut LPMP), kantor LPMP, Senin 14 September 2015, Pukul 08:00 WIB.

1) Disdikbud

- a) Kendala internal diperoleh dari diri pribadi calon kepala sekolah yang kurang ahli dalam penggunaan ilmu teknologi (IT), dalam hal ini adalah saat memasukkan data pribadinya pada situs *online* “Padamu Negeri” dan kendala internal juga diperoleh saat penandatanganan surat perjanjian bermaterai oleh calon kepala sekolah untuk menyatakan kesediannya tidak akan menuntut pihak Disdikbud jikalau tidak diangkat sebagai kepala sekolah meskipun telah dinyatakan lulus sebagai kepala sekolah oleh LPMP.
- b) Kendala eksternalnya seperti: surat edaran untuk para guru-guru yang disampaikan oleh Disdikbud kepada kepala sekolah cenderung bersifat subjektif karena kepek yang bersangkutan hanya memilih guru-guru yang disenanginya saja kecuali pada saat edaran sampai langsung ada monitor yang terjun ke sekolah-sekolah.
- c) Perlu adanya anggaran dana tambahan untuk kegiatan seleksi administrasi oleh tim rekrutmen di Disdikbud agar proses seleksi administrasi dapat berjalan secara lebih maksimal.

2) LPMP

- a) Kendala internalnya adalah calon kepala sekolah yang telah lulus administrasi masih belum dapat dinyatakan lulus setelah mengikuti seleksi akademik. Untuk itu, perlu digunakan rangking demi objektivitas.
-

- b) Kendala eksternalnya adalah kurangnya komunikasi antara Disdikbud dan LPMP yang berakibat pada *miss communication* sehingga berpengaruh pada kelancaran jalannya seleksi akademik dan diklat di LPMP.